

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Rabu
 Tanggal : 17 Juni 2026
 Pukul : 10.30 – 12.00 WIB
 Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan

I. Jenis Rapat : Paripurna

II. Sifat Rapat : Terbuka

III. Acara Rapat :

1. Pembukaan Rapat Paripurna
2. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi atas
 Penyampaian Nota Keuangan Raperda
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 Tahun Anggaran 2025
3. Penutupan Rapat Paripurna

IV. Pimpinan Rapat

Nama : HUSEN, S.Ag., M.Pd.
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan

V. Sekretaris Rapat

Nama : PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

VI. Jumlah Seluruh Anggota Dewan

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	12	orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	10	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	7	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	6	orang

5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	5	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	5	orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	:	5	orang
JUMLAH	:	50	orang

VII. Jumlah Anggota Dewan Yang Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	11	orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	9	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	4	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	5	orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	3	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	3	orang
7. Fraksi NasDeM Ummat Keadilan Sejahtera	:	3	orang
JUMLAH	:	38	orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.
2. H. ALI AFANDI
3. AH. MUJTABA, S.E.
4. NURHASYIM, S.IP.
5. SAIFUDDIN ZUHRI
6. ASLICHAH, S.Pd.
7. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.
8. SUHERMAN
9. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.
10. ANDRIYATI KUSUMAWARDANI
11. FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. Drs. H. KACUNG PURWANTO
2. H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.
3. M. FAISOL RAMA HAKIM
4. TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.
5. DIDIK BIYANTO, S.H.
6. Ir. SUYATMOKO, M.M.
7. A. FATHONI, S.S.
8. MUDZAKIR
9. Drs. NA'IM, M.Ag.

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. HUSEN, S.Ag., M.Pd.
2. ERNA SUJARWATI, S.Pd.
3. Hj. NING DARWATI
4. AHMAD UMAR BUWANG, S.H.

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.
2. Drs. H. SUHARTONO
3. ANSHORI, S.Sos.
4. SULASTRI, S.E.
5. H. SRINOTO, S.E.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. ALI MAKHFUDL, S.Ag., SH., MM
2. HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.
3. NASRUDIN, S.T.

6) Fraksi Partai Demokrat

1. MIMMAS'IDAH, S.E.
2. BUDI SULIS SETIYO
3. BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ

7) Fraksi NUKS

1. MUSLIKH
2. H. TASIRIN, S.H., M.H.
3. ROFIU'UDIN

VIII. Jumlah Anggota Dewan Yang Tidak Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3 orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	: 1 orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	: 2 orang
6. Fraksi Partai Demokrat	: 2 orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	: 2 orang
Jumlah	: 12 orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. Drs. MUTOYO, S.Pd.

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. BUSONO ADI SUSANTO
2. META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.
3. Ir. SUPONO

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. DIMYATI, S.H.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. AHMAD, S.Ag.
2. WIJI, S.E.

6) Fraksi Partai Demokrat

1. Ir. SUGENG SANTOSO
2. ALDINO HADY WIJAYA

7) Fraksi NUKS

1. MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL, S.Pd.
2. RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.

IX. Undangan

1. Bupati Lamongan
2. Wakil Bupati Lamongan
3. Kapolres Lamongan
4. DANDIM 0812 Lamongan
5. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
6. Ketua Kejaksaan Negeri Lamongan
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Lamongan
8. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
9. Sekretaris DPRD
10. Staf Ahli Bupati
11. Asisten Sekretaris Daerah
12. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
13. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kab. Lamongan
14. Camat se-Kab. Lamongan

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka Pandangan Umum Fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026, dimulai.

Mengawali acara hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Lamongan, hadirin dimohon berdiri.

LAGU INDONESIA RAYA DIKUMANDANGKAN

Hadirin dimohon duduk Kembali. Kepada Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada Pimpinan Rapat.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(HUSEN, S.Ag., M.Pd. – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Sdr. Bupati;

Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati;

Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan rekan-rekan Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna ini kita buka, Saya minta dari Sekretariat DPRD untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD dari masing-masing Fraksi. Dipersilahkan!

Sekretariat DPRD :

(USMAN, S.E., M.M. – Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)

Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing Fraksi, pada Rapat Paripurna Hari Kedua dalam rangka Pandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, sebagai berikut :

- Satu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 12, jumlah yang hadir 11, jumlah yang tidak hadir 1.
- Dua, Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 10, jumlah yang hadir 9, jumlah yang tidak hadir 1.
- Tiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 7, jumlah yang hadir 4, jumlah yang tidak hadir 3.
- Empat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 6, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 1.
- Lima, Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 3, jumlah yang tidak hadir 2.
- Enam, Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 3, jumlah yang tidak hadir 2.
- Tujuh, Fraksi NUKS, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 3, jumlah yang tidak hadir 2.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(HUSEN, S.Ag., M.Pd. – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Terima kasih.

Berdasarkan daftar hadir dari 50 Anggota Dewan yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi, telah hadir sebanyak 38 Anggota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim".

Rapat Paripurna Hari Kedua dalam rangka Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari

ini Rabu, tanggal 17 Juni 2026 pukul 10.30 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUKAN PALU 3 KALI

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebagaimana Rapat Paripurna hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026 lalu, Saudara Bupati telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan berikutnya adalah Pandangan Umum Fraksi, sebelum melanjutkan ke tahap penyampaian Pandangan Umum dari masing-masing Fraksi, saya tawarkan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan pada Rapat Paripurna Ini diserahkan atau dibacakan?

DIBACA DAN DISERAHKAN!!!

KETUKAN PALU 1 KALI

Selanjutnya sesuai mekanisme dan tahapan berikutnya adalah penyampaian Pandangan Umum dari masing-masing Fraksi yang akan disampaikan oleh juru bicaranya, dengan urutan sebagai berikut :

Pertama, kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan Juru Bicara Yth. Sdr. **ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.** kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F P K B)**

TERHADAP

**PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**



**DISAMPAIKAN PADA :
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TANGGAL 17 JUNI 2026**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth, Sdr. Bupati Lamongan

Yth, Sdr. Wakil Bupati Lamongan

Yth, Ketua, Para Wakil Ketua serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan

Yth, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan

Yth, Sdr Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.

Rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq, hidayah dan inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, karena atas pertolongan-Nya sampai pada saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiyat sehingga kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, rabu 17 Juni 2026, dengan agenda Pandangan umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban



atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Lamongan

Kedua, Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan dan keteladanan beliau, sampai saat ini kita masih berada pada jalan kebenaran. Selanjutnya sebelum Fraksi kami menyampaikan pandangan umum, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.

Kedua, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat saudara Bupati Kabupaten Lamongan, yang pada sidang paripurna tepatnya tanggal 12 juni 2026 waktu yang lalu telah menyampaikan isi dari laporan atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 .

Ketiga, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas diperolehnya **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut serta memperoleh Predikat “A” Pada Tahun 2025.



Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Hal ketepatan dan waktu pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyampaian laporan pelaksanaan APBD Merupakan agenda tahunan dari siklus pengelolaan keuangan daerah, dimana laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dimana APBD tahun 2025 juga sudah menggambarkan dan menjelaskan mengenai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kurun waktu satu tahun. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam pandangan umum menanggapi, Penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 ini. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengklasifikasikan pembahasannya dalam urutan sebagai berikut :



I. PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Pendapatan Asli daerah dalam tahun 2025 ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2024 kemarin yakni sebesar **3 triliun 299 milyar 247 juta 222 Ribu 532 rupiah 62 sen**. Sedangkan pada Tahun 2025 sebesar **3 triliun 217 milyar 044 juta 298 ribu 581 rupiah 15 sen atau 99,35** persen yang dapat kita ketahui pada laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2025.

1. Pajak Daerah

Nampaknya besaran nominal dari pendapatan pajak kini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 ini terealisasi sebesar **682 milyar 224 juta 262 ribu 129 rupiah**, sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar **559 milyar 459 juta 748 ribu 451 rupiah 62 sen**.

Namun dari FPKB berpendapat, sudah menjadikan Tolak ukur lagi untuk lebih berkerja keras bersama lagi mencapai kenaikan yang lebih. Fluktuasi (ketidak tetapan) ini disebabkan adanya kenaikan maupun penurunan dari beberapa obyek pajak. Dan dengan hasil inipun perlu adanya **peninjauan Kembali karna hanya beberapa sektor pajak saja yang mengalami peningkatan**.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai komponen penyumbang pendapatan asli daerah pada tahun 2025 mencapai tingkat realisasi sebesar **97,37 persen**, atau **303 milyar 864 juta 458 ribu 349 rupiah 40 sen** nampaknya tidak ada kenaikan besaran nominal retribusi daerah ini dalam 2 tahun terakhir.



3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, tingkat Realisasinya menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar **21 milyar**, sedangkan tahun 2025 ini hanya terealisasi sebesar **20 milyar 927 juta 284 ribu 014 rupiah 05 sen atau 109,40 persen**. Dimana pencapaian penerimaan terbesar berasal dari PT. BPD Jawa Timur dengan realisasi sebesar **5 milyar 543 juta 125 ribu 013 rupiah atau 100 persen**. Sedangkan semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi. **Fraksi kebangkitan bangsa berpendapat**, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah diharapkan melakukan pendayagunaan aset – aset yang tidak / kurang bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan.

4. Lain – lain PAD yang sah

Terhadap lain – lain PAD yang sah ini, selama 1 tahun terakhir ini nampaknya ada peningkatan yang sangat signifikan. Dan terealisasi sebesar **78 milyar 497 juta 403 ribu 193 rupiah atau 97,51 persen** dan pencapaian terealisasi tersebut berasal dari Hasil penjualan BMD Yang tidak dipisahkan **1 milyar**, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan **1 milyar**, Pendapatan Blud **61 milyar 310 Juta 383 Ribu 765 rupiah atau 94,27 persen**.



Dan dari hasil tersebut Fraksi PKB memberikan masukan yakni merupakan hal yang wajar apabila mengalami penurunan maupun kenaikan karna masih cukup dinilai fluktuatif. **Maka, dari itu perlu ditingkatkan Kembali !**

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 secara Keseluruhan telah terealisasi sebesar **3 trilyun 175 Milyar 564 Juta 168 Ribu 282 Rupiah 51 sen atau 95,55 Persen**. Secara rinci berasal dari seluruh komponennya, yang meliputi ;

Belanja Operasional, terealisasi sebesar **2 triliyun 144 milyar 903 juta 263 ribu 796 rupiah 01 sen atau tercapai sebesar 95,54 persen** Mengingat Belanja Operasional merupakan komponen belanja yang terbesar untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah, maka **Fraksi kami berharap** agar Pencapaiannya terukur dengan jelas, juga agar petugas teknis memberikan bimbingan dan fasilitasi masyarakat dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya Dinas terkait yakni :

1. **Dinas Perhubungan**, yang sampai saat ini masih sering sekali terjadi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Juru Parkir ke oknum dinas perhubungan, padahal sudah jelas kalau itu merupakan suatu pelanggaran



hukum dan tidak diperbolehkan namun sampai saat detik ini, masih banyak kasus pungli yang dilakukan. Dan sudahkan ini ditindak lanjuti ?. **Mohon ini dijelaskan !**

2. **Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)** , Kurang maksimalnya pendapatan asli daerah ini sangat terlihat jelas, seperti halnya disektor Pendapatan Pajak Daerah hanya dari beberapa sektor saja. Namun mengapa yang lain tidak mengalami kenaikan sama sekali. Begitupun dari Sektrore Retribusi juga seperti itu yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. **Mohon dinas terkait untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya !**
3. **Dinas Ketahanan Pangan**, Mutu peningkatan di sektor dinas ketahanan pangan perlunya menyadari harga kebutuhan pokok seiring waktu semakin naik, contoh saja harga beras yang kian hari semakin tinggi sehingga banyak yang tidak bisa membeli namun sebaliknya harga padi petani justru turun.
4. **Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan perkebunan** , dapat dilihat dari kondisi naiknya harga pupuk dalam sektor ini perlunya untuk diketahui. Petani merasa kecewa dengan melambungnya harga pupuk yang tidak mampu mereka beli, sehingga hasil panen yang di dapatkanpun tidak seimbang dengan harga pupuk yang di beli. Dan harga Padipun dari petani dibeli dengan harga yang murah. Sedangkan dari jumlah yang diketahui



dari realisasi pada tahun 2025 yang diberikan ini sangat besar. **Maka, dari itu Mohon dijelaskan.**

Belanja Modal, terealisasi sebesar **409 milyar 659 juta 784 ribu 107 rupiah 50 sen atau tercapai 96,61 persen**, Untuk itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap kepada Pemerintah Daerah agar kegiatan yang dibiayai oleh Belanja Modal memiliki manfaat jangka menengah dan panjang bagi kemajuan daerah serta memiliki nilai ekonomis.

Belanja Tidak terduga, terelisasi sebesar **816 juta 519 ribu 778 rupiah atau tercapai 20,16 persen**, Untuk itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap kepada pemerintah agar penyaluran dana untuk pembayaran belanja tidak terdugas untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan khusus kepada kabupaten lamongan Tahun 2024 dan Pembayaran Belanja Tidak terduga untuk Pengembalian Dana BOS untuk sekolah yang sudah ditutup pada tahun 2023 (SD Patihan kec. babat) sudah disetor ke Kasda Kabupaten Lamongan untuk segera dilakukan.

Belanja Transfer, terealisasi sebesar **95,33 persen atau sebesar 620 milyar 184 juta 600 ribu 601 rupiah**. Belanja transfer, yakni belanja yang digunakan untuk mengakomodir sharing penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar **99,99 %** serta belanja bantuan keuangan sebesar **95,15% .** Melihat dari hasil tersebut Fraksi PKB kabupaten lamongan menyetujui Untuk itu mestinya belanja daerah yang seharusnya selalu naik dari tahun ke tahun, **supaya lebih ditingkatkan kembali .**



C. Surplus / Defisit

Dari hasil target defisit yang ditetapkan didalam APBD Tahun 2025, di peroleh realisasi defisit (Kelebihan) sebesar **85 Milyar 549 Juta 155 Ribu 616 Rupiah 77 sen** terhadap belanja total dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan turun. **Untuk belanja tidak langsung atau belanja tidak terduga juga turun.** Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merasa hal ini butuh **Penjelasan lebih lanjut** dengan kondisi tersebut diatas.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk Kinerja pembiayaan, dari sisi penerimaan tercapai realisasi sebesar **94,00 persen** yang berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar **88 milyar 549 juta 155 ribu 166 rupiah 77 sen.** Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar **44 milyar 689 juta 091 Ribu 763 Rupiah atau 89,37 Persen.** Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan, yang terealisasi sebesar **3 milyar**, adalah merupakan bentuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memohon penjelasan dari penyertaan modal atau investasi pemerintah Daerah ini **untuk apa mohon penjelasan !**

Sedangkan pembiayaan netto tercatat sebesar **85 milyar 549 juta 155 ribu 616 rupiah 77 sen.** Dengan demikian pada APBD tahun 2025 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar **124 Milyar 718 Juta 377 Ribu 678 Rupiah 41 sen.**



Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Sedangkan, untuk laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih yang merupakan akumulasi SILPA periode berjalan dan periode tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, pada tahun anggaran 2025 didapat **124 Milyar 718 Juta 377 Ribu 678 Rupiah 41 sen.**

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab I, II, III dan IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Performance APBD Tahun 2025 ini adalah yang **cukup mengalami peningkatan dari pada tahun kemarin**, dengan indikator : (a) Pendapatan daerah turun ,dibandingkan tahun 2024 (b) Proporsi belanja tidak langsung atau tidak terduga **turun** dibandingkan belanja langsung, ini perlu di pertanyakan kenapa bisa terjadi hal seperti itu (c) Dari belanja langsung proporsi belanja modal **naik** dibanding belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
2. Masih banyak pendapatan berasal dari obyek retribusi yang selalu konstan dari tahun ke tahun walaupun potensinya naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dan untuk dinas terkait juga perlu bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kinerja di bidangnya masing-masing.



B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan performance APBD tahun 2025 ini disarankan agar peningkatan potensi pendapatan daerah melakukan efisiensi belanja pegawai dan kapitalisasi belanja barang dan jasa dan juga belanja yang tidak terduga.
2. Peninjauan kembali obyek–obyek retribusi yang kadaluwarsa untuk disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi untuk bisa memberikan hasil yang cukup maksimal kedepannya dan usahakan sesuai dengan dana yang sudah di berikan itu konstan kalau bisa ada kenaikan lagi.
3. Pemberian bantuan hibah, bantuan keuangan dan bantuan lainnya khususnya terhadap sekolah–sekolah, lembaga/ yayasan, organisasi masa/profesi dan jalan poros desa, diminta untuk memperhatikan rasa keadilan dengan pertimbangan yang obyektif baik dari sudut idiologi–politik, kewilayahan–kedaerahan, maupun sosio-kultural lainnya. Sehingga aspirasi anggota DPRD sebagai representasi/wakil rakyat agar betul – betul diperhatikan. Pengguna anggaran diharapkan lebih meningkatkan pengawasannya dalam membelanjakan dana yang tersedia, selain itu peningkatan kualitas pembangunan juga harus tetap diperhatikan.

VI. PENUTUP



Demikian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pengantar nota keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan koreksi untuk kebaikan bersama. Terhadap apa yang telah kami sampaikan manakala ada yang salah dan tidak menyenangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

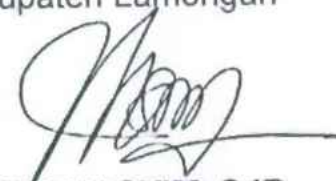
Wallohul Muwaafiq ila Aqwamithoriq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 17 Juni 2026

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan


H. ALI AFANDI
Ketua


H. NUR HASYIM, S.IP
Sekretaris



Disampaikan terima kasih.

Kedua, kepada Fraksi Partai Golongan Karya dengan Juru Bicara Yth. Sdr. **MUDZAKIR** kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Disampaikan Pada :
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2026

PANDANGAN UMUM		
Acara	:	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025
Fraksi	:	Fraksi Partai Golkar
Hari, Tanggal	:	Rabu, 17 JUNI 2026
Juru Bicara	:	MUDZAKIR

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

=====

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Lamongan

Yth. Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan

Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan, Sekretaris DPRD dan Kepala

Kantor serta camat se Kab. Lamongan

Rekan-rekan wartawan serta undangan yang berbahagia

Pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada hari ini Rabu, 17 Juni 2026

dapat menghadiri Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi–Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 tanpa ada halangan apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang diridloi oleh Allah SWT dan memberikan teladan kepada umatnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebelum Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pandangan Umum pada rapat paripurna yang terhormat ini, Perkenankanlah Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutan pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna hari Jum'at, 12 Juni 2026. Pengantar ini yang dijadikan salah satu dasar bagi Fraksi Partai Golkar untuk melakukan pencermatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya pada hari ini dapat disampaikan pandangan umum fraksi.

Ucapan terima kasih juga Fraksi Partai Golkar sampaikan kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menjadi bentuk penyampaian laporan atas penggunaan sumber daya keuangan daerah, tetapi juga menjadi

wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki peran strategis sebagai sarana evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. Melalui mekanisme pertanggungjawaban tersebut, dapat diketahui sejauh mana kebijakan anggaran yang telah ditetapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah Fraksi Partai Golkar mengamati dan mencermati Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2025, secara formal sudah sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berbuah Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.

Kita patut bangga bahwa Kabupaten Lamongan mendapatkan Opini WTP dari BPK untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Mudah-mudahan prestasi yang didapatkan ini berdampak positif dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Capaian luar biasa ini bukan sekadar pengakuan teknis atas kualitas laporan keuangan, melainkan merupakan cerminan nyata dari kematangan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan ini perlu Fraksi Partai Golkar sampaikan beberapa hal terkait dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar **3 triliun 217 milyar 44 juta 298 ribu 581 rupiah 15 sen atau 99,35 persen** dari target yang ditetapkan sebesar **3 triliun 237 milyar 843 juta 583 ribu 900 rupiah**. Prosentase realisasi pendapatan tahun 2025 ini ternyata memiliki tingkat realisasi lebih besar dari pada tingkat realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024.

Adapun komponen-komponen Realisasi pendapatan daerah berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar **99,79 Persen** atau tumbuh **21,70 persen** dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi Partai Golkar mengakui bahwa pertumbuhan ini sebagai sinyal positif, akan tetapi pertumbuhan PAD ini masih didominasi oleh faktor

eksternal yakni kontribusi terbesar dari Opsen Bea Baliknama kendaraan bermotor sebesar **113,67 persen** dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar **107,37 persen**. Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar Opsen merupakan instrumen yang lahir dari kebijakan pemerintah pusat bukan hasil inovasi atau kerja keras fiskal daerah secara mandiri. Mohon potensi PAD dari sumber lain untuk lebih dioptimalkan.

Sedangkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar **99,23 persen** dari target yang ditetapkan, pendapatan transfer ini masih menjadi tuiang punggung penerimaan daerah mengingat pendapatan transfer memiliki porsi sekitar **78,8 persen** dari total pendapatan daerah. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah harus merespon dengan strategi pengurangan ketergantungan yang kongkrit, mengingat dominasi DAU menjadi sumber terbesar pendapatan transfer ini sangat rentan terhadap perubahan

kebijakan transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. ***Mohon diperhatikan.***

2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar ***3 triliun 175 milyar 564 juta 168 ribu 282 rupiah 51 sen*** atau ***95,55 Persen*** dari target yang ditetapkan. Pada Belanja Operasi yang terealisasi sebesar ***95,54 persen***, Fraksi Partai Golkar melihat bahwa ini merupakan efisiensi yang ditunjukkan, terutama pada pos Belanja Bunga yang jauh di bawah pagu, mencerminkan pengelolaan kewajiban yang terukur dan sehat.

Sedangkan pada belanja Modal yang terealisasi sebesar ***96,61 persen*** dengan porsi terbesar pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memperkuat konektivitas dan pelayanan publik. Kami juga mendorong agar kualitas fisik

dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun senantiasa diperhatikan melalui program pemeliharaan yang memadai.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan, kiranya pantas kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang telah aktif berpartisipasi pada sidang paripurna hari ini.

Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengemban amanah rakyat. Kami berharap sinergi antara Eksekutif, Legislatif, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Lamongan yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Atas nama Fraksi Partai Golkar mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa selalu meridloi segala amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Lamongan, 17 Juni 2026

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



UJIK SILVIAN EFFENDI, ST, MM

Sekretaris



TULUS SANTOSO, S.Pd, M.A.P

Disampaikan terima kasih.

Ketiga, kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Juru Bicara Yth. Sdr. **ERNA SUJARWATI, S.Pd.** kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TERHADAP

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DISAMPAIKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
TANGGAL, 17 JUNI 2026**



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

=====

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat Siang, Salam Damai Sejahtera Untuk Kita Semua***

MERDEKA!

Yang Terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang Terhormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lamongan.

Yang Terhormat, Anggota Forum komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan.

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yang Terhormat, saudara para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, Camat, dan

Segenap Undangan dan Para Wartawan Yang Berbahagia.



Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita sebagai penyelenggara negara, dengan menghadiri dan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam acara penyampaian **PANDANGAN UMUM** Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 pada hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada *uswahhasanah* kita Nabi Muhammad S.A.W, yang telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita menuju ke jalan yang benar dan di ridhohi oleh Allah SWT, dan semoga kita dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tetap berjuang untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Lamongan yang kita cintai bersama.

Sebelum kami menyampaikan **PANDANGAN UMUM** ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian



(WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Lamongan, mudah-mudahan prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, yang pada gilirannya akan berdampak pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Tak lupa Fraksi PDI Perjuangan kabupaten Lamongan mengucapkan **“Selamat Hari jadi Lamongan yang ke 457 semoga kedepan Lamongan semakin sejahtera”**.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Mengawali penyampaian PANDANGAN UMUM Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Lamongan atas penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2026 yang lalu.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan PANDANGAN UMUM nya sebagai berikut :



BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
BAB III	: LAPORAN ARUS KAS (LAK)
BAB IV	: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAB V	: PEMBAHASAN
BAB VI	: PENUTUP DAN KESIMPULAN



BAB I

PENDAHULUAN

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga sudah menyajikan transparansi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai Akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disesuaikan berdasarkan hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan masing-masing OPD selaku entitas Akuntansi yang wajib melaporkan : 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan Operasional, 4. Laporan Perubahan



Ekuitas, dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan. Dari laporan masing-masing SKPD tersebut maka disusunlah Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai entitas Pelaporan.



BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

A. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintahan Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Setelah melihat pendapatan LRA yang disajikan oleh saudara Bupati dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 tersebut, maka terdapat hal-hal yang perlu dicermati antara lain :

1. PENDAPATAN

Total realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar **3 triliun 217 milyar 44 juta 298 ribu 581 rupiah 15 sen** atau **99,35** persen dari target yang ditetapkan, realisasi tersebut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar **680 milyar 859 juta 068 ribu 912 rupiah 15 sen** atau **99,79 persen** dari target yang ditetapkan.



Jika realisasi tahun 2024 sebesar **3 triliun 299 milyar 247 juta 222 ribu 532 rupiah 62 sen**, realisasi tersebut bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar **559 milyar 459 juta 748 ribu 457 rupiah 62 sen**.

Maka pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **2,49 persen**, khusus untuk PAD 2025 mengalami pertumbuhan sebesar **21,70 persen** dari PAD dari tahun sebelumnya yang tumbuh kurang lebih **5,80 persen**, bahwa terhadap realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan PAD mengalami kenaikan, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah pada tahun 2026 lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai inovasi oleh pemerintah kabupaten, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan Kabupaten Lamongan masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

2. BELANJA

Belanja Daerah dan tranfer Kababupaten Lamongan tahun 2025 terealisasi sebesar **3 triliun 175 milyar 564 juta 168 ribu 282**



rupiah 51 sen atau 95,55 persen dari alokasi anggaran, sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar **3 triliyun 207 milyar 611 juta 153 ribu 293 rupiah 61 sen**, belanja tahun 2025 mengalami penurunan kurang lebih **1 persen** dari tahun 2024.

Bahwa adanya penurunan disetiap sektor adalah bagian dari efesiensi anggaran dengan tetap mengutamakan program prioritas, namun demikian patut kita apresiasi khususnya belanja modal dengan porsi terbesar diperuntukan untuk **Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan** sebesar **307 Milyar 309 Juta 304 Ribu, 116 Rupiah 50 sen atau 98,20 persen capaian realisasi** .

Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan untuk di tahun berikutnya mengoptimalkan belanja prioritas dalam rangka mensejahterakan Masyarakat Lamongan .



BAB III

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Laporan arus kas adalah informasi yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu juga bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih (Ekuitas) suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Ada beberapa komponen/pos pada laporan arus kas yang akan kami cermati antara lain :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas aktivitas operasi adalah menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Adapun selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktifitas operasi akan menghasilkan arus kas bersih dari aktifitas operasi. Setelah melihat arus kas dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini menunjukkan kenaikan terhadap jumlah arus kas bersih dari aktifitas operasi, *tahun 2023 sebesar 384 milyar 404 juta 942*



ribu, tahun 2024 sebesar 477 milyar 634 juta 293 ribu, sedangkan tahun 2025 sebesar 450 milyar 113 Juta 939 ribu

Arus kas bersih aktifitas operasi hingga tahun 2025 tersebut diatas cenderung stabil menunjukkan “Likuiditas” keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2025 lebih baik atau uang kas lancar.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas aktifitas investasi ini menggambarkan aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh dan melepaskan aset tetap serta investasi lainnya, arus kas bersih dari aktifitas investasi adalah selisih arus masuk dari aktifitas investasi dengan arus keluar dari aktifitas investasi. Cara pengukurannya yaitu semakin baik investasinya jika diukur dari semakin tingginya nilai minus arus kas bersih. Setelah mencermati data LAK dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2023 sebesar *minus 336 milyar 597 juta 903 ribu*, sedangkan tahun 2024 sebesar *minus 385 milyar 998 juta 223 ribu*, sedangkan tahun 2025 sebesar *minus 408 milyar 633 juta 809 ribu*. Hal ini memberikan indikasi “Solvabilitas” Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 3 tahun ini masih kurang baik, untuk menjadikan koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.



c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktifitas pendanaan adalah aktifitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Selanjutnya setelah melihat tabel LAK pada 3 tahun terakhir ini, maka arus masuk kas dari aktifitas pendanaan dari tahun 2023 sebesar *minus 97 milyar 122 juta 512 ribu* tahun 2024 sebesar *minus 77 milyar 273 juta 427 ribu* sedangkan tahun 2025 sebesar *44 milyar 689 juta 91 ribu* Terhadap arus kas dari aktifitas pendanaan tahun 2025 diperoleh dari pinjaman Pemerintah Daerah dari Lembaga keuangan Bank sebagai beban pengeluaran pembiayaan di tahun berikutnya.



BAB V

PEMBAHASAN

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tepat sasaran dan berkesinambungan. Dimana Fraksi PDI Perjuangan selalu menekankan APBD yang pro rakyat, memprioritaskan alokasi anggaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat, menekan kemiskinan dan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Anggaran daerah tidak hanya sekedar formalitas dilaporkan melalui buku berjilid- jilid, tetapi wajib mencerminkan keadilan, transparansi, dan juga dampak Panjang yang secara langsung dirasakan oleh Masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan akan selalu memastikan porsi anggaran yang memadai untuk beberapa sektor penting:

1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Kesehatan
3. Sektor Sosial
4. Sektor Pertanian
5. Sektor Pembangunan



6. Sektor Penanggulangan Bencana
7. Sektor Pendapatan Daerah
8. Sektor Ketenagakerjaan.
9. Sektor Perempuan dan Anak

PEMBAHASAN

Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah Aspek penting dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” maka di Tengah- Tengah kondisi modernisasi Pendidikan yang jauh dari cara- cara penjajahan jaman dulu, tantangan kita saat ini adalah bagaimana dunia Pendidikan di Kabupaten Lamongan dapat berjalan transparan dan akuntabel guna memastikan tidak ada penyimpangan- penyimpangan yang terjadi.



1. Penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan peserta didik harus bebas dari praktik- praktik jual beli kursi Pendidikan khususnya yang marak terjadi saat ini, Fraksi PDI Perjuangan menerima keluhan dari Masyarakat bahwa SPMB SMP di Lamongan diwarnai dengan praktik- praktik penyimpangan dan itu terjadi di Pusat Kota Lamongan. Sebagai Atensi SMPN 1 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, dan SMPN 3 Lamongan serta tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sekolah-sekolah lainnya.
2. Sekolah SD Gratis, itu hanya klaim semata. Anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang salah satunya dimanfaatkan untuk Pengadaan buku dan Bahan Pembelajaran, Realitasnya masih terdapat pungutan dari pihak sekolah dengan marak jual beli LKS (Lembar Kerja Siswa) dan buku pendamping yang dibebankan kepada wali murid. Ditengarai dengan kurikulum yang ada tidak bisa difasilitasi dengan buku pedoman ataupun LKS karena isinya yang berbeda. Praktek guru atau komite sekolah yang menjual LKS secara kolektif melanggar ketentuan, maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan mengarahkan siswa untuk menggunakan Lembar Kerja berbasis digital atau membuat LKS mandiri secara gratis.



3. Pemerintah daerah harus memastikan kualitas belajar- mengajar di sekolah tetap optimal diseluruh satuan Pendidikan khususnya Sekolah Dasar yang dalam catatan banyak fasilitas sekolah dasar seperti Gedung, Toilet, tempat ibadah, dan lapangan yang tidak memadai. Serta jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan mendorong dalam hal ini Bupati dan wakil bupati Lamongan untuk segera menyelesaikan PR yang sudah dikerjakan beberapa tahun terakhir namun belum terselesaikan yaitu Marger Sekolah Dasar yang peserta didiknya sangat sedikit guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemerataan kualitas pendidikan, optimalisasi tenaga pendidik dan evesiensi penggunaan sarana prasarana dan anggaran Pendidikan.
4. Kesejahteraan Guru Honorer sekolah negeri, Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap guru- guru yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Gaji guru honorer kita ketahui bersama 250- 300 ribu/ bulan itu dibawah standar kelayakan hidup. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati dan wakil bupati Lamongan untuk serius melihat dan menangani kondisi ini setidaknya patokan yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan.



Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah daerah untuk menyelesaikan Honorer yang belum PPPK sekitar kurang lebih 637 orang sebelum diberlakukanya kebijakan pemerintah rekrutmen PPPK. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Lamongan untuk segera menyelesaikan Tanggungjawab pembayaran insentif guru GTT dan PTT di SD Negeri dan SMP Negeri senilai 200-250 ribu/ bulan terhitung Januari 2026- Juni 2026. Mari kita hargai bersama jasa- jasa, gotong royong guru- guru kita baik secara finansial, tenaga dan pikiran yang menopang keberlangsungan keberhasilan anak- anak kita ,

5. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk turut andil dan mengoptimalkan dalam jalanya keberhasilan program MBG terutama dalam pengawasan kualitas makanan yang dikirim ke sekolah. Jam pengiriman ke sekolah sampai pada menu makanan yang dikirim sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahli gizi. Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan kepada optimalisasi Satgas MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah



Sektor Kesehatan

Fraksi PDI Perjuangan meminta Rapat Koordinasi Bersama Legislatif, Dinkes, Dinsos, Direktur RSUD se- Kabupaten Lamongan, Kepala Puskesmas, BPJS dan BPS untuk menyelaraskan visi dan misi Lamongan sehat dengan program- program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Dengan demikian tidak ada lagi masalah- masalah terhadap penanganan pasien yang membutuhkan layanan Kesehatan.

1. Pemerintah daerah harus gencar mensosialisasikan program- program prioritas Kesehatan kepada Masyarakat seperti LASERKU, BPJS PBID, dan program Kesehatan lainnya. ditengarai dengan kondisi Jaminan Kesehatan banyak terputus paska pemberlakuan Inpres 4 tahun 2025 tentang DT-SEN sebesar 52.000 BPJS JKN Kabupaten Lamongan yang terputus. Dinsos dan Dinkes serta RSUD harus selaras dalam menyikapi pasien atau masyarakat yang membutuhkan layanan Kesehatan namun bpjsnya dalam kondisi tidak aktif dan juga memiliki riwayat sakit kronis.
2. Permudah Administrasi Program Laserku bagi Masyarakat kurang mampu atau dalam kondisi sangat membutuhkan perawatan medis. Memaksimalkan program Laserku untuk pasien darurat dapat menyelesaikan persolan pemutusan BPJS yang dalam kondisi sakit kronis.



3. Memaksimalkan Program BPJS PBID untuk mendorong percepatan UHC. Hari ini 63.000 penerima BPJS PBID 2025- 2026 yang harusnya berdasarkan alokasi yang ada cukup untuk 83.000 penerima. Masih ada space 20.000 untuk menyelamatkan pasien- pasien kronis dengan kondisi BPJS terputus.
4. Fraksi PDI Perjuangan melihat postur anggaran Laserku dan juga BPJS PBID 2025, dengan persoalan yang banyak terjadi di 2026 maka, wajib dioptimalkan anggaran Laserku dan PBID sebesar 35 M di tahun 2026.
5. Fraksi PDI Perjuangan Meminta RSUD dalam hal ini RSUD Soegiri Lamongan secara substansi melakukan perbaikan manajemen agar tidak ada masalah dikemudian hari karena sistem pengelolaan Rumah Sakit yang tidak transparan dan akuntabel. Dimulai dari SDM dokter, Penerimaan Rujukan, Diagnosa Pasien dan klaim BPJS Kesehatan, pengelolaan keuangan BLUD, dan juga Jasa pelayanan harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sektor Sosial

Fraksi PDI Perjuangan menelaah kondisi ketimpangan data yang terjadi di Masyarakat, dari keputusan BPJS, penerimaan bansos sembako, PKH, dan bantuan lainya yang bersumber dari data DTKS kabupaten



Lamongan yang pada hari ini sudah diperas menjadi DT-SEN, sumber dari ketimpangan data kemiskinan di Lamongan tersebut karena tidak adanya kantong data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial Lamongan.

1. Fraksi PDI Perjuangan meminta dari data Pertanggungjawaban APBD tahun 2025 lebih dioptimalkan Kembali kerja- kerja kerakyatan Dinas Sosial untuk turun dan cek kondisi di lapangan. Sesungguhnya ada yang lebih penting dari pada angka dan capaian berapa yang sudah menerima program sosial dari Dinsos. Tapi outcome penerima manfaat apakah ada peningkatan taraf kehidupanya paska di beri bantuan.
2. Dinas Sosial harus bekerja secara humanis, melihat kebijakan pemerintah pusat pemberlakuan DT-SEN yang mengakibatkan persoalan- persoalan di Masyarakat kita saat ini dari putusnya BPJS sampai putusnya bansos. Dinas Sosial harus mencari Solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika mengacu pada kebijakan DT-SEN dan berkata tidak untuk menyelesaikan persoalan layanan Kesehatan yang hari ini banyak terjadi, maka itu jauh dari kata humanis.

Sektor Pertanian

Apresiasi terhadap capaian kabupaten Lamongan sebagai Lumbung Pangan Nasional, capaian lain predikat agromaritim food hub



nasional, Lamongan juga penyangga utama ketahanan pangan nasional untuk komoditas jagung.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terimakasih kepada seluruh instansi, pemerintah daerah, TNI, Polri yang bergotong royong dalam mendukung program swasembada pangan. Bersama ini Fraksi PDI Perjuangan juga menelaah dengan adanya capaian- capaian, kita tidak boleh menutup mata dan telinga dampak yang diakibatkan karena praktik- praktik pembukaan lahan hutan untuk penanaman jagung secara ugal- ugalan di Kawasan hutan Lamongan Selatan. Legalisasi atas nama ketahanan pangan saat ini terjadi, Kawasan hutan rusak berganti hamparan jagung menghijau memicu kerusakan ekologis yang masif. Kondisi ini memicu erosi tanah dilahan miring juga berpotensi menyebabkan krisis air dan banjir tahunan bagi pemukiman yang ada di bawahnya. Dampak lain yang ditimbulkan selain kekeringan ekstrim saat kemarau, banjir dan longsor saat penghujan, juga kerusakan ekosistem seperti ledakan hama tikus yang terjadi di Lamongan 9 tahun terakhir. tikus bermigrasi menyerang lahan pertanian dan akhirnya gagal panen, begitu juga wilayah kedungpring utara, perbatasan kedungpring dan modo selalu gagal panen karena banjir merendam saat musim tanam maupun panen tiba.



Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati dan wakil bupati Lamongan untuk jemput bola melakukan koordinasi lintas kewenangan dari pemerintah daerah (Bapenda, Dinas Ketahanan pangan dan pertanian, dan Bagian Perekonomian dan SDA), Aparat Penegak Hukum (TNI dan POLRI), Perum Perhutani (KPH Mojokerto), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Timur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pemerintah Desa dan Kecamatan. Untuk mengambil Langkah kongkrit memperbaiki kondisi lahan hutan yang sudah rusak dengan reboisasi masal, mensosialisasikan kepada petani hutan bahwa reboisasi itu penting guna untuk kesejahteraan anak cucu kita. Di kabupaten Lamongan tantanganya lebih sulit karena bukan korporasi tetapi saudara- saudara kita sendiri.

Fraksi PDI Perjuangan mengajak semuanya untuk terlibat dalam merawat pertiwi, Gerakan ini adalah wujud nyata kecintaan kita terhadap bumi dan lingkungan yang berfokus pada pelestarian alam, menjaga kelestarian sumber air, dan menanam pohon demi masa depan.

Sektor Penanggulangan Bencana

Minimnya anggaran penanggulangan bencana di BPBD kabupaten Lamongan tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan untuk



Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lamongan, sebagai pengatur alokasi anggaran daerah harus memiliki political will yang menjamin kesejahteraan public baik kebutuhan dasar masyarakat maupun penyelesaian masalah seperti bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di Lamongan.

Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada BPBD untuk Bersiap menghadapi dampak elnino godzilla yang akan terjadi sampai November 2026 mendatang,

Sektor Pembangunan

Melihat Realisasi pokok- pokok pikiran anggota DPRD Lamongan tahun 2025, maka Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan- percepatan Pembangunan melalui salah satunya adalah penghapusan kebijakan hibah dan digantikan dengan program- program kerakyatan yang berdampak langsung untuk kepentingan Masyarakat seperti Pembangunan jalan, bedah rumah, beasiswa sekolah gratis, bantuan permodalan untuk kepala keluarga perempuan, dan juga bantuan jaminan Kesehatan,



Sektor Pendapatan Daerah

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda untuk melakukan penertiban Pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran. Sudah saat nya Lamongan menggunakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, real time menggunakan tapping box di setiap restoran yang ada di kabupaten Lamongan. Dengan alat tersebut dapat mencegah manipulasi data, memastikan transparansi omzet restoran, dan meminimalkan potensi kebocoran pajak. Jika tahun 2025 PAD Lamongan meningkat 21.70% dari tahun 2024 maka Fraksi PDI Perjuangan meminta kenaikan PAD Kabupaten Lamongan tahun 2026 sebesar 100% dari PAD tahun 2024.

Sektor Ketenagakerjaan

Fraksi PDI Perjuangan meminta dari banyaknya kasus yang terjadi diperusahaan-perusahaan Kabupaten Lamongan khususnya terhadap upah pekerja tiap jam harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku UU cipta kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Ketenagakerjaan untuk turun ke lapangan melakukan sidak lapangan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di



kabupaten Lamongan, selain itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong transparansi Anggaran CSR, juga mendorong TAPD untuk optimalisasi anggaran CSR di kabupaten Lamongan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan penting seperti, Penanggulangan Bencana Banjir dan kekeringan, membantu penanganan kasus kekerasan seksual, pendirian TPA (Tempat Penitipan Anak) resmi yang dimiliki Kabupaten Lamongan, pelayanan sosial dan Kesehatan serta beasiswa Pendidikan, dan juga Alokasi anggaran untuk daerah-daerah kekeringan sumber air

Sektor Perempuan dan Anak

Fraksi PDI Perjuangan mendorong DP3AKB (Dinas pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana) untuk melakukan koordinasi khusus dengan TAPD mengingat maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di tempat Penitipan anak swasta. DP3AKB juga harus sedia payung sebelum hujan melakukan sidak-sidak secara langsung ke tempat-tempat penitipan anak yang sudah memilikim ijin resmi dan juga mendorong tempat-tempat TPA yang belum berijin guna memastikan nol kekerasan terhadap anak di TPA Kabupaten Lamongan.



BAB VI

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikian penyampaian Pandangan Umum oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, setelah menimbang hasil pencermatan dan analisa data-data laporan keuangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 ini jika dibandingkan dengan data tahun-tahun yang kemarin sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik.

Semoga apa yang kami sampaikan sebagai bentuk masukan dan koreksi yang membangun terhadap kinerja Pemerintah Daerah saat ini, dan untuk masukan dimasa mendatang. Demikian Penutup dan kesimpulan yang kami sampaikan, jika ada hal-hal kalimat dan ucapan yang tidak berkenan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan mohon maaf yang sebesar- besarnya.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

Lamongan, 17 Juni 2026

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



ERNA SUJARWATI, S.Pd., M. Sos



Sekretaris



BUSONO ADI SUSANTO, SM



Disampaikan terima kasih.

Keempat, kepada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Juru Bicara Yth. Sdr.

SULASTRI, S.E. kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN

FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

PANDANGAN UMUM

TERHADAP

**LAPORAN KEUANGAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



DISAMPAIKAN PADA :

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN SIDANG 2026**

PANDANGAN UMUM

ACARA : Pandangan Umum Fraksi Terhadap
Laporan Keuangan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Lamongan Tahun
2025

FRAKSI : FRAKSI PARTAI GERINDRA

HARI/TANGGAL : RABU / 17 JUNI 2026

JURU BICARA : SULASTRI, SE.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
TERHADAP
NOTA KEUANGAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;

Yth, Ketua, Wakil Ketua serta seluruh anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;

Yth, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Lamongan;

Yth, Sdr. Sekretaris Daerah, dan seluruh pejabat di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Yth, Sdr. Ketua MUI Kabupaten Lamongan;

Rekan-rekan Wartawan yang kami hormati dan hadirin sekalian
yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke-hadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, karena atas pertolongan-Nya, sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan dan menghadiri Sidang Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya, Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingannya sampai saat ini kita berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan

Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 12 Juni 2026 yang lalu, yang selanjutnya pada hari ini dapat disampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Lamongan karena secara berturut-turut ke-10 kalinya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta memperoleh predikat "A" dalam SAKIP dari KemenPANRB.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Mencermati Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan, maka **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut :

Sektor Pendapatan Daerah

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan apresiasi yang tinggi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai *680 milyar 859 juta 68 ribu 912 rupiah 15 sen* atau 99,79 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang sebesar *559 milyar 459 juta 748 ribu 451 rupiah 62 sen*, maka terjadi pertumbuhan riil sebesar 21,70 persen atau naik *121 milyar 399 juta 320 ribu 460 rupiah 53 sen*. Hal ini merefleksikan tren positif dalam penguatan fondasi kemandirian fiskal daerah.

Keberhasilan Sektor Pajak Daerah didorong oleh performan realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang menembus target hingga 102,59 persen, dengan realisasi sebesar *277 milyar 569 juta 922 ribu 754 rupiah 81 sen* dari pagu *270 milyar 541 juta 595 ribu 119 rupiah*. Faktor penopang utamanya adalah kebijakan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

yang mencapai efektivitas 113,37 persen serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 107,37 persen.

Namun demikian, di balik keberhasilan pajak, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** melayangkan catatan kritis pada pos Pendapatan Retribusi Daerah. Realisasinya berhenti di angka 97,37 persen, yaitu hanya terkumpul *303 milyar 864 juta 458 ribu 349 rupiah 40 sen* dari target *312 milyar 54 juta 524 ribu 88 rupiah*. Artinya, terdapat potensi pendapatan daerah sebesar *8 milyar 190 juta 65 ribu 738 rupiah 60 sen* yang gagal dipungut atau hilang pada tahun berjalan. Terlebih lagi, angka ini mengalami kontraksi atau penurunan tajam dibanding realisasi Retribusi Daerah TA 2024 yang sempat menyentuh angka *354 milyar 10 juta 748 ribu 886 rupiah 28 sen*.

Mengapa performa retribusi daerah justru merosot pasca-pandemi? Mohon penjelasan tertulis mengenai objek retribusi apa saja yang gagal memenuhi target, serta strategi konkret

Bapenda dalam memberantas kebocoran administrasi pemungutan di lapangan.

Sektor Belanja Daerah dan Transfer

Total Belanja dan Transfer Kabupaten Lamongan TA 2025 terealisasi sebesar *3 trilyun 175 milyar 564 juta 168 ribu 282 rupiah 51 sen* atau 95,55 persen dari alokasi anggaran. Secara makro administratif, angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan penyerapan yang cukup tinggi.

Namun demikian, Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan sebesar *4 milyar 50 juta rupiah*, yang hanya mampu dieksekusi 20,16 persen. Sisa anggaran BTT yang tidak terpakai mencapai *3 milyar 233 juta 480 ribu 222 rupiah*. Mengapa di tengah fluktuasi cuaca ekstrem di Lamongan dan kebutuhan jaring pengaman sosial darurat bagi masyarakat bawah, anggaran darurat ini justru mengendap hingga hampir 80 persen? Apakah ini murni karena tidak ada kejadian darurat,

ataukah karena lambatnya koordinasi antar-instansi serta rigiditas regulasi internal eksekutif yang membuat anggaran ini sulit dicairkan saat masyarakat membutuhkan? Mohon penjelasan!

Realisasi Belanja Bunga hanya menyerap 43,74 persen. apakah sisa pagu bunga sebesar *710 juta 379 ribu 85 rupiah* yang tidak terealisasi ini dikarenakan adanya percepatan pelunasan pokok utang sebelum jatuh tempo, atukah terjadi kesalahan dalam kalkulasi proyeksi beban bunga pada saat penyusunan APBD murni? Mohon penjelasan!

Realisasi Pembiayaan

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memandang, melalui kombinasi realisasi pendapatan yang optimal dan adanya sisa belanja yang tidak terserap, Pemerintah Kabupaten Lamongan justru berhasil membukukan Surplus Fiskal Riil sebesar *41 milyar 480 juta 130 ribu 298 rupiah 64 sen*.

Akibat dari akumulasi surplus tahun berjalan dan penerimaan pembiayaan nett, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lamongan pada akhir tahun anggaran 2025 melesat tajam menembus angka *124 milyar 718 juta 377 ribu 678 rupiah 41 sen*. Angka ini melonjak sangat drastis atau meningkat sebesar 223,52 persen jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 yang hanya sebesar *38 milyar 550 juta 78 ribu 16 rupiah 77 sen*.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyoroti, Di satu sisi, kas daerah berada dalam posisi yang sangat aman. Namun, di sisi lain, tumpukan uang menganggur sebesar itu menjadi indikator bahwa banyak program-program kemasyarakatan yang gagal dieksekusi atau perencanaan anggaran daerah terlalu longgar. Dana sebesar *124 Miliar* lebih ini seharusnya bisa berputar di masyarakat untuk memicu stimulus ekonomi lokal tahun 2025. Bagaimana rincian rencana taktis eksekutif untuk memanfaatkan SiLPA besar ini dalam APBD Perubahan TA 2026

agar langsung menyentuh pemulihan daya beli masyarakat?

Mohon penjelasan!

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Akuntabilitas keuangan di atas kertas (WTP) harus berjalan selaras dengan indikator riil kesejahteraan masyarakat di lapangan. Berikut adalah catatan dan rekomendasi kritis **Fraksi**

Partai Gerakan Indonesia Raya :

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Bapenda tidak boleh terlena dengan tingginya pendapatan dari sektor opsen kendaraan bermotor yang bersifat *windfall* (bagi hasil provinsi). **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta Bapenda melakukan intensifikasi objek retribusi daerah yang mandek dan memperbaiki akurasi basis data potensi agar target retribusi pada tahun berjalan tidak terus meleset dan mengakibatkan kehilangan pendapatan daerah.

2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, PU Sumber Daya Air, dan Perumahan Rakyat

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mendesak rumpun dinas PU untuk memastikan konektivitas jalan yang dibangun diprioritaskan pada jalur logistik pertanian dan UMKM, bukan sekadar mengejar serapan anggaran, agar ketimpangan ekonomi masyarakat dapat ditekan.

3. Dinas Pendidikan

Dua indikator dimensi pengetahuan Kabupaten Lamongan tercatat melambat pada tahun 2025. Harapan Lama Sekolah (HLS) mandek tumbuh hanya sebesar 0,07 persen, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melambat pertumbuhannya menjadi 0,25 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 1,67 persen. Anggaran *mandatory spending* fungsi pendidikan yang besar harus dievaluasi penyerapannya. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada

pembangunan fisik sekolah, melainkan memperkuat program intervensi penanganan anak putus sekolah (*zero drop-out*) dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah pelosok Lamongan.

4. Dinas Kesehatan dan RSUD (dr. Soegiri / Ngimbang / Karangkembang)

Laporan Neraca menunjukkan masih adanya saldo Kas di BLUD yang mengendap sebesar *9 milyar 497 juta 955 ribu 932 rupiah 22 sen.* **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** mengingatkan Dinas Kesehatan dan jajaran manajemen RSUD agar dana kas BLUD yang mengendap tersebut segera dioptimalkan untuk peningkatan mutu layanan obat-obatan dan fasilitas darurat medis publik. Jangan sampai puskesmas atau rumah sakit daerah mengalami kekosongan obat atau antrean yang mengular karena lambatnya eksekusi anggaran operasional BLUD.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian / Dinas Perikanan

Mengingat pertanian dan perikanan adalah sektor basis mayoritas penduduk Lamongan, rumpun dinas ini belum memiliki sistem mitigasi yang kuat terhadap pergeseran musim tanam dan ketidakstabilan cuaca. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta dinas terkait mengoptimalkan bantuan sarana prasarana produksi pertanian (saprotan), sumur bor air dangkal, serta asuransi gagal panen yang bersumber dari efisiensi belanja daerah, guna melindungi stabilitas pendapatan petani dan petambak Lamongan.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pandangan Umum yang dapat disampaikan oleh **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2025, kami berharap seluruh saran, masukan dan pertanyaan yang kami sampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat sebagai bahan koreksi dan perbaikan serta mendorong semangat untuk memperbaiki kinerja keuangan, tak lupa kami menyampaikan terima kasih atas jerih payahnya dalam usaha memajukan pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 17 Juni 2026

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,



H. SRINOTO, SE



Sekretaris,



DIMYATI, SH.

Disampaikan terima kasih.

Kelima, kepada Fraksi Partai Amanat Nasional dengan Juru Bicara Yth. Sdr. **NASRUDIN, S.T.** kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LAMONGAN**

PANDANGAN UMUM

Terhadap

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**Disampaikan pada :
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Tahun Sidang 2026**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan Oleh Juru Bicara :

NASRUDIN, S.T.

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Yth, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.
- Yth, Saudara Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan.
- Yth, Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan.
- Yth, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Yth, Saudara Para undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* pada hari ini kita dapat memenuhi undangan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2026 dalam

acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Atas Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan suri tauladan dalam kehidupan serta telah membimbing umat manusia *mina dlulumati ilannuur*.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada saudara Bupati Lamongan yang telah menyampaikan Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal 12 Juni 2026.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional pada Rapat Paripurna hari ini.

Sebagai perwujudan pelaksanaan sistem keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, maka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami sampaikan apresiasi atas prestasi keberhasilan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali secara berturut-turut, serta memperoleh Predikat “A” (Sangat Baik) dalam Standar Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Prestasi tersebut hendaklah diimbangi juga

dengan akselerasi, percepatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat menuju Kejayaan Kabupaten Lamongan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang terhormat.

Setelah mencermati dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025. Fraksi kami berpandangan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBD merupakan suatu keniscayaan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, profesional yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan nilai manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya Fraksi PAN menyampaikan pandangan sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH

Dari sisi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Lamongan tahun 2025 ditargetkan sebesar *3 trilyun 237 milyar 843 juta 583 ribu 900 rupiah*, dan telah terealisasi sebesar *3 trilyun 217 milyar 44 juta 298 ribu 581 rupiah 15 sen*.

A. Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan menggali potensi Pendapatan Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dengan tidak memberatkan masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan tugas otonomi di daerahnya, untuk itu Fraksi

PAN berharap agar Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas layanan publik serta profesional dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sebesar *680 milyar 859 juta 68 ribu 912 rupiah 15 sen atau tercapai 99,79 persen* dari target sebelumnya, yang terdiri atas:

Pajak Daerah, terealisasi sebesar *277 milyar 569 juta 922 ribu 754 rupiah 81 sen* atau tercapai *102,59 persen*. Berkaitan dengan Pajak Daerah, Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dan jajarannya dalam meningkatkan hasil dari pajak daerah. Namun peningkatan hasil Pajak Daerah ini haruslah diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan wajib pajak.

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar *303 milyar 864 juta 458 ribu 349 rupiah 40 sen* atau hanya tercapai sebesar *97,37 persen*. Terkait dengan hal tersebut Fraksi PAN berharap agar Pemerintah Daerah terus melakukan optimalisasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terealisasi sebesar sebesar *20 milyar 927 juta 284 ribu 614 rupiah 5 sen* atau tercapai *109,40 persen*. Fraksi PAN berharap agar Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengelolaannya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar 78 milyar 497 juta 403 ribu 193 rupiah 89 sen atau hanya tercapai 97,51 persen. Berkaitan dengan komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Fraksi PAN berharap agar terus dilakukan kajian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dibarengi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang merupakan pendapatan yang berasal dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara keseluruhan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 2 triliun 536 milyar 185 juta 229 ribu 669 rupiah atau terealisasi sebesar 99,23 persen.

Fraksi kami berharap agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga memperoleh bagian pendapatan transfer yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang terhormat.

II. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah secara keseluruhan tahun 2025 telah terealisasi sebesar 3 triliun 175 milyar 564 juta 168 ribu 282 rupiah 51 sen atau 95,55 persen yang meliputi :

Belanja Operasi, terealisasi sebesar 2 triliun 144 milyar 903 juta 263 ribu 796 rupiah 1 sen atau 95,54 persen. Belanja

Operasi merupakan komponen belanja yang terbesar untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah, maka Fraksi kami berharap agar capainnya terukur dengan jelas. Disamping itu juga agar terus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur sehingga capaian kinerja bisa optimal. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial agar tepat sasaran dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Belanja Modal, terealisasi sebesar *409 milyar 659 juta 784 ribu 107 rupiah 50 sen* atau tercapai *96,61 persen*. Untuk itu Fraksi PAN berharap kepada Pemerintah Daerah agar kegiatan yang dibiayai oleh Belanja Modal khususnya Pembangunan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan agar terjaga kualitasnya serta memiliki manfaat jangka menengah dan panjang bagi kemajuan daerah serta memiliki nilai ekonomis.

III. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun 2025, terealisasi surplus sebesar *41 milyar 480 juta 130 ribu 298 rupiah 64 sen*.

IV. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar *83 milyar 238 juta 247 ribu 379 rupiah 77 sen* atau tercapai *94,00 persen* yang berasal dari komponen Penggunaan SILPA serta Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank.

Pengeluaran Pembiayaan tidak terealisasi.

Dengan demikian, Pembiayaan Netto tetap sebesar *83 milyar 238 juta 247 ribu 379 rupiah 77 sen*.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya apabila ada usul, saran, dan pendapat kami dalam Pandangan Umum ini yang kurang berkenan tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT dalam setiap aktifitas yang kita lakukan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 17 Juni 2026

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Ketua,


ALI MAKHFUDL, S.Ag, SH, M.M

Sekretaris,


HAMZAH FANSURI, SH, MH.

Disampaikan terima kasih.

Keenam, kepada Fraksi Partai Demokrat dengan Juru Bicara Yth. Sdr.
MIMMAS'IDAH, S.E. kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PANDANGAN UMUM

**TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

Disampaikan pada :

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Tanggal, 17 Juni 2026

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**ASSHALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.**

- Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
- Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
- Yang Kami Hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan
- Yang Kami Hormati Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan serta hadirin dan undangan sekalian.

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini.

Fraksi Partai Demokrat Lamongan **MENYAMPAIKAN BANYAK TERIMA KSIH** yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan wakil Bupati beserta jajaran eksekutif yang telah melaksanakan dari pada Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025 dengan Baik.

Selanjutnya, melalui forum yang terhormat ini, Fraksi Partai Demokrat Lamongan menyampaikan beberapa catatan, pandangan, dan saran sebagai berikut:

- I. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp680,8 miliar. Capaian tersebut mengalami lonjakan peningkatan sebesar 21,7% jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2024 yang berada di angka Rp559,4 miliar, ini menunjukkan PAD 2025 meningkat, Tetapi Fraksi Partai Demokrat Lamongan Berpandangan PAD ini bisa ditingkatkan lagi berdasar:
 1. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat kabupaten Lamongan mengalami kenaikan nilai.
 2. Pengelolaan Pasar yang dikelola oleh PD Pasar Secara Profesional sehingga tidak mengalami kerugian seperti tahun-tahun lalu.
 3. Mengoptimalkan dari pada Retribusi Parkir dan Pajak sehingga tidak banyak terjadi Perembesan Dana dari Retrebusi Parkir dan Pajak.
 4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebocoran sektor pajak dan retribusi daerah.
 5. Pengelolaan dari pada BUMD Aneka Usaha secara Profesional sehingga dapat mengembangkan bidang-bidang usaha yang lain dan berakhir menghasilkan PAD lebih besar, tidak seperti sekarang BUMD Aneka Usaha seperti Hidup Segan Mati Tak Mau.

6. Pengelolaan Bank Daerah Lamongan (BDL) harus melaksanakan Kegiatan perbankan secara profesional, sehingga tidak terjadi banyak kredit macet yang pada akhirnya akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank Daerah Lamongan (BDL) sehingga Bank Daerah Lamongan tercatat kurang baik oleh OJK, kalau BDL sehat dan berjalan sesuai dengan On the Track maka akan meningkatkan PAD Lamongan.

II. Untuk kedepan Fraksi Partai Demokrat Lamongan berharap Pemerintahan Kabupaten Lamongan bisa lebih hadir di masyarakat dalam rangka penguatan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Lamongan Yaitu:

1. Dibidang pertanian: Fraksi Partai Demokrat Berharap Pemerintah bisa memberikan ketersediaan obat dan pupuk serta bisa membangun / normalisasi saluran irigasi pertanian untuk Petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka
2. Di Bidang Perikanan: Fraksi Partai Demokrat Lamongan Berharap Pemerintahan Kabupaten Lamongan Menyediakan Perlindungan terhadap Penjagaan Harga hasil panen ikan dengan menyediakan Cold storage untuk menjaga stabilitas harga yang tidak pernah disediakan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai saat ini, sehingga menghancurkan harapan kesejahteraan Petaninya (Petambak ikan tawar)
3. Dibidang Peternakan: Fraksi Partai Demokrat Lamongan berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk selalu aktif mengadakan penyuluhan kesehatan ternak dan pemenuhan obat2an Peternakan sehingga menghasilkan hasil yang baik untuk kesejahteraan peternak

4. Bidang Pendidikan: Fraksi Partai Demokrat Lamongan berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan kedepan Pemerintahan Kabupaten Lamongan Memperbesar Anggaran untuk menyediakan Sarana dan prasaran Pendidikan tingkat SD/SMP/ sederajar Baik Negeri Maupun Swasta, dikarenakan terutama Sekolah Dasar Negeri yang mana Sarana dan Prasaran yang sangat memperhatikan dikarenakan anak-anak juga berhak mendapatkan sarana dan fasilitas pendidikan yang layak, ini dilakukan biar tidak terkesan bahwa Pendidikan layak tidak hanya untuk anak Pejabat, Orang kaya atau kaum Borjois.
5. Bidang Kesehatan: Fraksi Partai Demokrat Lamongan meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyediakan Anggaran Kesehatan Gratis bagi Masyarakat yang kurang mampu, karena kita harus menerima kenyataan banyak BPJS Kelas 3 (Tiga) atau BPJS untuk warga Miskin banyak yang terhapus dan tidak bisa digunakan, maka pemerintah Kabupaten Lamonagan wajib menyediakan anggaran kesehatan tersebut karena Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu hak dasar dari bagi Rakyat yang harus disediakan oleh Pemerintah, sehingga kita tidak menjadi Pemerintahan yang dzolim terhadap rakyatnya.

HADIRIN DAN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Demikian Pandangan Umum ini kami sampaikan. Fraksi Partai Demokrat Lamongan berharap catatan kritis dan saran yang kami berikan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan kajian bersama antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah rakyat.

**BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH,
WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.**

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 15 Juni 2026

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



HJ, MIMMAS'IDAH, SE

Sekretaris



**BAHRUDIN MUHAMMAD
ALFIAN ARZAQ, ST**

Disampaikan terima kasih.

Ketujuh, kepada NasDem Ummat Keadilan Sejahtera dengan Juru Bicara Yth. Sdr.

ROFI'UDIN kami persilahkan.

PENYERAHAN DOKUMEN

PANDANGAN UMUM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI NASDEM UMMAT Keadilan Sejahtera
KABUPATEN LAMONGAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**



**Disampaikan pada:
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
17 Juni 2026**

PANDANGAN UMUM

**Acara : Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap
Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025**

Fraksi : NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2026

Juru Bicara : ROFI'UDIN, S.Kom.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI NASDEM UMMAT Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
Terhadap
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

Yth. Ketua, para Wakil Ketua serta segenap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

Yth, Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab.
Lamongan

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

Yth. Para Kepala OPD di Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Lamongan

Rekan-rekan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kami
hormati

Serta hadirin dan segenap undangan yang berbahagia.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati

Pertama-tama, marilah kita tiada henti memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir sekaligus menunaikan kewajiban konstitusional kita dalam Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah dan mengalir kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Berdiri di mimbar yang mulia ini, dalam rangka memenuhi siklus konstitusional pengelolaan keuangan daerah, Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera memandang bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan momentum krusial. Agenda ini melampaui sekadar ritual formalitas atau pemenuhan kewajiban administratif tahunan antara eksekutif dan legislatif. Lebih dari itu, ini adalah ruang refleksi, evaluasi, dan transparansi publik untuk mengukur sejauh mana efektivitas setiap rupiah uang rakyat yang tertuang dalam APBD telah dikonversi menjadi kemaslahatan nyata.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati

Lamongan beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 dengan tepat waktu.

Apresiasi ini kami landaskan pada semangat kemitraan yang sejajar dan harmonis. Melalui penyampaian Nota Keuangan ini, eksekutif telah menunjukkan komitmennya untuk membuka ruang bedah fiskal yang akuntabel. Kami berharap, Raperda pertanggungjawaban ini menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*), responsif, dan berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang kita cintai bersama.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera (FNUKS) mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Setelah mencermati penjelasan Saudara Bupati Kabupaten Lamongan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, maka kami, Fraksi

NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera (FNUKS) mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut :

I. APRESIASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN PRESTASI DAERAH

Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera memberikan ucapan selamat dan apresiasi yang tulus atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Lamongan yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini kian lengkap dengan diraihnya Predikat "A" (Sangat Baik) dalam Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPAN-RB.

Bagi Fraksi kami, dua capaian ini bukan sekadar piagam penghargaan administratif semata. Penghargaan ini merupakan indikator kuat bahwa komitmen kita bersama dalam membangun *Clean Governance* dan *Performance-Based Governance* di Lamongan berjalan di jalur yang benar (*on the right track*). Tidak lupa, Fraksi kami mengingatkan agar pencapaian ini senantiasa dikonversi menjadi Nilai Manfaat Publik (*Public Value*) yang dirasakan langsung secara riil oleh seluruh lapisan masyarakat Lamongan.

II. ANALISIS FISKAL DAN EVALUASI POSTUR ANGGARAN (LRA)

Menyikapi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 yang telah dipaparkan, Fraksi NasDem Ummat

Keadilan Sejahtera memberikan beberapa catatan, catatan kritis, serta pertanyaan sebagai berikut:

1. *Kemandirian Fiskal Daerah (PAD)*

Fraksi kami mencatat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah mencapai **3 Triliun 217 Milyar 44 Juta 298 Ribu 581 Rupiah 15 Sen** (Rp.3.217.044.298.581,15) (99,35% dari target). Kami mengapresiasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai **680 Milyar 859 Juta 68 Ribu 912 Rupiah 15 Sen** (Rp. 680.859.068.912,15) (99,79%), tumbuh sebesar 21,70% dibandingkan TA 2024. Kemandirian fiskal ini harus terus dijaga. Kami memberikan catatan khusus bagi performa positif Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 113,67%, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 107,37%, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang menembus 143,17%.

- **Pertanyaan Fraksi:** Bagaimana strategi Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang untuk mereplikasi lompatan kinerja PAD ini pada sektor-sektor retribusi dan pajak daerah lainnya yang saat ini belum optimal?

2. *Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*

Fraksi kami memberikan apresiasi atas kinerja PT. Bumi Lamongan Sejati yang mampu memberikan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga mencapai 177,48% dari target.

- **Pertanyaan Fraksi:** Bagaimana dengan evaluasi kinerja BUMD lainnya di Kabupaten Lamongan? Mohon penjelasan rinci mengenai langkah pembinaan dan

restrukturisasi yang dilakukan eksekutif terhadap BUMD yang belum mampu memenuhi target deviden secara optimal.

3. Koreksi dari Defisit Struktural ke Surplus Riil

Meskipun postur awal APBD diproyeksikan mengalami defisit sebesar **85 Milyar 549 Juta 155 Ribu 616 Rupiah 77 Sen** (Rp.85.549.155.616,77) , eksekutif berhasil membalikkan kondisi fiskal dengan membukukan Surplus sebesar **41 Milyar 480 Juta 130 Ribu 298 Rupiah 64 Sen** (Rp.41.480.130.298,64) pada akhir tahun anggaran. Realisasi Belanja Daerah berjalan efektif pada angka 95,55% atau **3 Triliun 175 Milyar 564 Juta 168 Ribu 282 Rupiah 51 Sen** (Rp. 3.175.564.168.282,51).

- **Catatan Fraksi:** Fraksi kami mengapresiasi porsi terbesar Belanja Modal yang dialokasikan pada Sektor Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terealisasi sebesar **307 Milyar 309 Juta 304 Ribu 116 Rupiah 50 Sen** (Rp. 307.309.304.116,50) (98,20%). Hal ini sangat vital demi penguatan konektivitas wilayah. Namun, di sisi lain, peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang melonjak drastis menjadi **124 Milyar 718 Juta 377 Ribu 678 Rupiah 41 Sen** (Rp. 124.718.377.678,41), dibandingkan SiLPA 2024 yang hanya sebesar **38 Milyar 550 Juta 78 Ribu 16 Rupiah 77 Sen** (Rp.38.550.078.016,77) mengundang perhatian kami. Walaupun hal ini merefleksikan efisiensi belanja, tingginya SiLPA juga mengindikasikan adanya perencanaan program yang kurang presisi atau adanya

kendala eksekusi di beberapa OPD. Mohon penjelasan terperinci mengenai OPD mana saja yang menyumbang surplus sisa anggaran terbesar.

III. CATATAN NERACA DAERAH DAN MANAJEMEN ASET

Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera mencermati perkembangan positif pada posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2025:

- Total Aset meningkat sebesar **225 Milyar 868 Juta 793 Ribu 129 Rupiah 13 Sen** (Rp.225.868.793.129,13) menjadi (Rp. 6.161.005.578.672,61.)
- Ekuitas Daerah tumbuh 4,69% menjadi **6 Triliun 44 Milyar 142 Juta 199 Ribu 296 Rupiah 48 Sen** (Rp. 6.044.142.199.296,48)
- Kewajiban Daerah berhasil ditekan turun secara signifikan dari **162 Milyar 23 Juta 778 Ribu 241 Rupiah 53 Sen** (Rp. 162.023.778.241,53) menjadi **116 Milyar 863 Juta 379 Ribu 241 Ruiah 53 Sen** (Rp. 116.863.379.376,13)
- *Catatan dan Pertanyaan Fraksi:*

Penurunan kewajiban jangka pendek dan peningkatan aset lancar mencerminkan likuiditas kas daerah yang semakin sehat. Kendati demikian, seiring meningkatnya nilai Aset Tetap menjadi **5 Triliun 150 Milyar 396 Juta 902 Ribu 6 Rupiah 29 Sen** (Rp. 5.150.396.902.006,29), Fraksi kami menekankan pentingnya akurasi penatausahaan dan inventarisasi aset. Kami meminta jaminan agar peningkatan kuantitas aset ini dibarengi dengan sistem pengamanan hukum (sertifikasi) yang ketat guna meminimalisasi sengketa aset di kemudian hari.

IV. KESELARASAN PROGRAM DAN REKOMENDASI FRAKSI

Pelaksanaan APBD TA 2025 dituntut mampu menyokong 15 program prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan yang selaras dengan Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur serta Asta Cita Kebijakan Nasional. Sebagai penutup, Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah:

1. **Akselerasi Transformasi Layanan & Ketahanan Pangan:** Integrasi pembangunan harus difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal serta transformasi pemerintahan yang modern, cepat, dan responsif di seluruh pelosok wilayah Lamongan.
2. **Optimalisasi Sinergi:** Sinergi yang harmonis antara jajaran Eksekutif, Legislatif, dan FORKOPIMDA harus terus dipertahankan sebagai fondasi utama agar setiap kebijakan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung yang merata bagi masyarakat Lamongan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lamongan menyatakan **menerima dan siap membahas lebih lanjut** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Umum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan kekuatan, bimbingan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pengabdian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lamongan, 17 Juni 2026

**FRAKSI NASDEM UMMAT Keadilan Sejahtera
DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua

Sekretaris





M. ZAHUL KAHEL IQBAL, S.Pn **RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E**

Disampaikan Terima Kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lamongan tanggal 18 Mei 2026, Rapat Paripurna akan diselenggarakan kembali pada hari Senin, 22 Juni 2026 dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Rapat Paripurna pada hari ini pukul 12.00 WIB kami nyatakan ditutup.

KETUKAN PALU 3 KALI

Sekian terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBAWA ACARA :

Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri.

LAGU BAGIMU NEGERI DIKUMANDANGKAN

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Demikian rangkaian acara Paripurna pada hari ini, terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Wakil Ketua,


HUSEN, S.Ag., M.Pd.

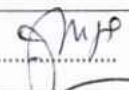
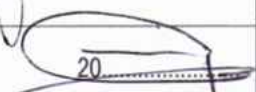
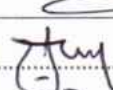
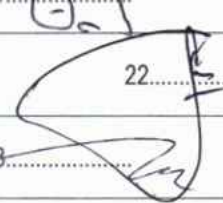
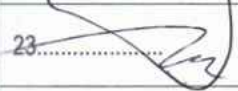
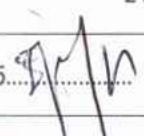
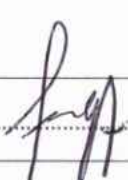
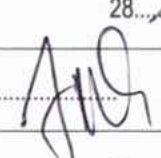
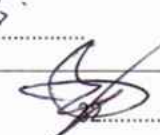
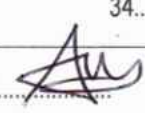
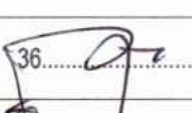
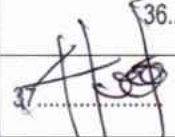
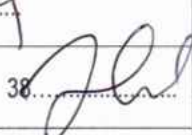


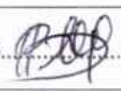
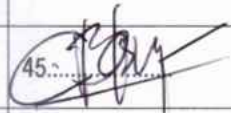
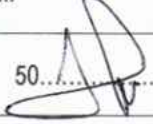
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

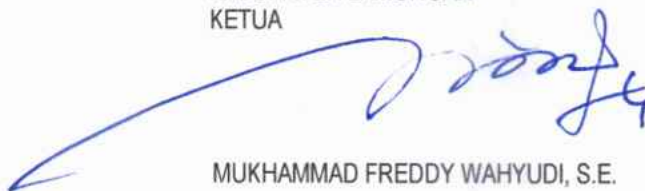
DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025 HARI RABU, TANGGAL 17 JUNI 2026

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.	KETUA	PKB	1.....
2	Drs. H. KACUNG PURWANTO	WAKIL KETUA	P.GOLKAR	2.....
3	HUSEN, S.Ag.,M.Pd	WAKIL KETUA	PDIP	3.....
4	IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.	WAKIL KETUA	P.GERINDRA	4.....
5	H. ALI AFANDI	ANGGOTA	PKB	5.....
6	AH MUJTABA, S.E.	ANGGOTA	PKB	6.....
7	NUR HASYIM, S.IP.	ANGGOTA	PKB	7.....
8	MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	8.....
9	MAHFUD SHODIQ, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	9.....
10	SUHERMAN	ANGGOTA	PKB	10.....
11	FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.	ANGGOTA	PKB	11.....
12	ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.	ANGGOTA	PKB	12.....
13	SAIFUDDIN ZUHRI	ANGGOTA	PKB	13.....
14	ASLICHAH, S.Pd.	ANGGOTA	PKB	14.....
15	ANDRIATI KUSUMAWARDANI	ANGGOTA	PKB	15.....
16	H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.	ANGGOTA	P.GOLKAR	16.....
17	M. FAISOL RAMA HAKIM	ANGGOTA	P. GOLKAR	17.....
18	TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.	ANGGOTA	P. GOLKAR	18.....

19	DIDIK BIYANTO, S.H.	ANGGOTA	P. GOLKAR	19..... 
20	MUDZAKIR	ANGGOTA	P. GOLKAR	20..... 
21	A. FATHONI, S.S.	ANGGOTA	P. GOLKAR	21..... 
22	Ir. SUYATMOKO, M.M.	ANGGOTA	P. GOLKAR	22..... 
23	Drs. NA'IM, M.Ag.	ANGGOTA	P. GOLKAR	23..... 
24	Drs. MUTOYO, M.Pd.	ANGGOTA	P. GOLKAR	24.....
25	ERNA SUJARWATI, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	25..... 
26	Ir. SUPONO	ANGGOTA	PDIP	26.....
27	BUSONO ADI SUSANTO	ANGGOTA	PDIP	27.....
28	Hj. NING DARWATI	ANGGOTA	PDIP	28..... 
29	AHMAD UMAR BUWANG, S.H.	ANGGOTA	PDIP	29..... 
30	META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	30.....
31	H. SRINOTO, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	31..... 
32	Drs. H. SUHARTONO	ANGGOTA	P.GERINDRA	32..... 
33	DIMYATI, S.H.	ANGGOTA	P.GERINDRA	33.....
34	SULASTRI, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	34..... 
35	ANSHORI, S.Sos.	ANGGOTA	P.GERINDRA	35..... 
36	ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.	ANGGOTA	PAN	36..... 
37	NASRUDIN, S.T.	ANGGOTA	PAN	37..... 
38	HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PAN	38..... 
39	WIJI, S.E.	ANGGOTA	PAN	39.....
40	AHMAD, S.Ag.	ANGGOTA	PAN	40.....

41	MIMMAS'IDAH, S.E.	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	41..... 
42	Ir. SUGENG SANTOSO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	42.....
43	BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	43..... 
44	ALDINO HADY WIJAYA	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	44.....
45	BUDI SULIS SETIYO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	45..... 
46	MUHAMMAD ZAHLUL KAHHEL IQBAL, S.Pn.	ANGGOTA	NUKS	46.....
47	MUSLIKH	ANGGOTA	NUKS	47..... 
48	RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.	ANGGOTA	NUKS	48.....
49	H. TASIRIN, S.H., M.H.	ANGGOTA	NUKS	49..... 
50	ROFI'UDIN	ANGGOTA	NUKS	50..... 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KETUA


MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.



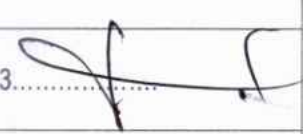
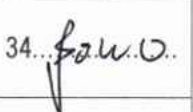
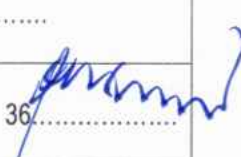
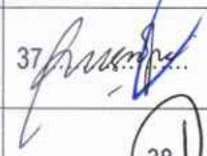
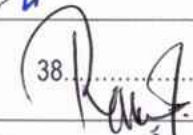
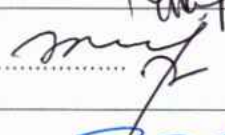
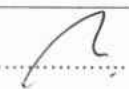
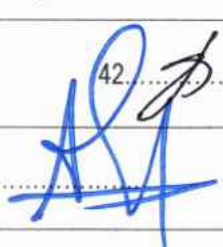
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

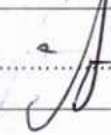
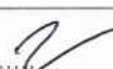
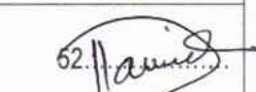
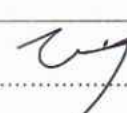
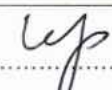
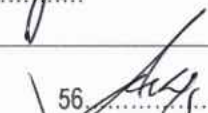
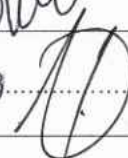
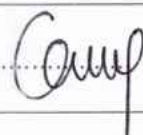
Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

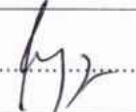
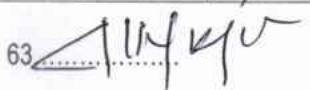
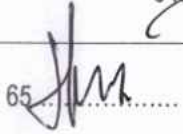
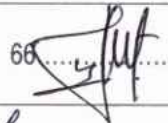
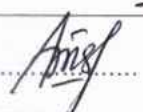
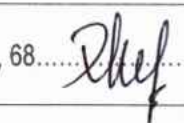
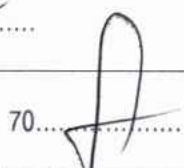
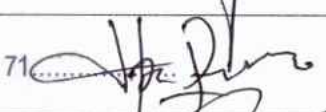
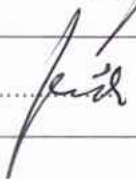
**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA
PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025
HARI RABU, TANGGAL 17 JUNI 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA. NIK.	BUPATI	1.....
2	DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T.,B.Eng.,M.Sc NIK.	WAKIL BUPATI	2.....
3	AKBP ARIF FAZLURRAHMAN, S.H., S.I.K., M.Si NRP.	KAPOLRES	3.....
4	LETKOL INF DENI SURYO ANGGO DIGDO NRP.	KOMANDAN KODIM 0812	4.....
5	BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. NIK.	KETUA PENGADILAN NEGERI	5.....
6	HENDRO WASISTO, S.H., M.H. NIK.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	6.....
7	Drs. MOH. NALIKAN, M.M. NIP. 19690703 198911 1 001	SEKRETARIS DAERAH	7.....
8	PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M. NIP.19691008 1995031 003	SEKRETARIS DPRD	8.....
9	JOKO NURSIYANTO, S.H, M.H NIP.19650706 199203 1 014	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	9.....
10	NIP.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	10.....
11	ETIK SULISTYANI , S.Sos, M.Si NIP.19710722 199203 2 005	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	11.....
12	A.FARIKH, S.H., M.M. NIP. 19670516 199602 1 003	INSPEKTUR	12.....
13	Drs.FADHELI PURWANTO, M.M. NIP.	STAF AHLI BUPATI BID. KEMASYARAKATAN & SDM	13.....

14	KANDAM, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670315 199412 1 003	STAF AHLI BUPATI BID. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	14.....
15	NIP.	STAF AHLI BUPATI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	15.....
16	H.RIDWAN FAUZI, S.Ag. M.H NIP.	KETUA PENGADILAN AGAMA	16.....
17	SUJARWO, ST., MM. NIP. 19740903 200112 1 005	KEPALA BEPPERIDA	17.....
18	FARAH DAMAYANTI Z., S.Sos., M.Si. NIP. 19730509 199803 2 005	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	18.....
19	JOHNY INDRIANTO FIRMANSYAH, S.STP., M.Si. NIP. 19830430 200112 1 002	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.....
20	Drs. MUHAMMAD SATUWI HERUWIDI, MM. NIP. 19690517 198809 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	20.....
21	EDY YUNAN A., SSTP, M.Si. NIP. 19801027 199912 1 001	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.....
22	SAMI'AN, S.E., M.M. NIP. 19700714 199303 1 001	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.....
23	NIP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.....
24	DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si. NIP. 19781204 201001 2 011	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.....
25	dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS. NIP.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.....
26	dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Kes. NIP. 19661113 199703 1 002	KEPALA DINAS KESEHATAN	26.....
27	Drs. SHODIKIN. M.Pd NIP. 19661019 198703 1 008	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	27.....
28	ANDHY KURNIAWAN, S.T, M.MT. NIP. 19750511 200604 1 011	KEPALA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	28.....
29	ERWIN SULISTYA PAMBUDI, S.T., M.M. NIP. 19770327 200312 1 006	KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	29.....

30	Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si NIP. 19710424 199101 1 001	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30..... 
31	UMURONAH, S.S.T., M.Kes. NIP.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	31..... 
32	Drs. DIANTO HARI WIBOWO NIP. 19760410 199412 1 002	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	32..... 
33	GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.E., M.Si. NIP.	KEPALA DINAS SOSIAL	33..... 
34	MOHAMMAD ZAMRONI, S.Sos, M.Si. NIP. 19730707 199303 1 010	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	34..... 
35	JARWITO, S.H. NIP. 19701022 199003 1 003	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.....
36	Dr. MUGITO, M.M. NIP. 196710241988091001	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	36..... 
37	YULI WAHYUONO, SH MM NIP.19660727 198903 1 006	KEPALA DINAS PERIKANAN	37..... 
38	Dr. SHOFIAH NURHAYATI, S.P., M.Si. NIP. 19720420 199602 2 001	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38..... 
39	ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si. NIP. 19750404 199602 1 003	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39..... 
40	SUGENG WIDODO, S.Sos. MM NIP. 19681219 198903 1 002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40..... 
41	SITI RUBIKAH, S.E., M.Si NIP. 19700607 199803 2 003	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	41..... 
42	JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP. NIP.19780514 199711 1 001	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	42..... 
43	dr. ABDUR ROHMAN, Sp.PD. NIP.	DIREKTUR RSUD dr. SOEGIRI	43.....
44	dr. HILDA NIP.	DIREKTUR RSUD NGIMBANG	44.....
45	dr. MAYA DEWI H., M.MRS NIP.19830220 2010 2 016	DIREKTUR RSUD KARANGKEMBANG	45.....

46	dr. PANJUMI KHORIDA, M.Kes. NIP. 19770420 200604 2 026	DIREKTUR RSUD KI AGENG BRONDONG	46..... 
47	ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos., M.M. NIP. 19720205 190201 1 003	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47..... 
48	MOCH.NAIM, S.Sos., M.Si NIP. 19690324 198903 1 007	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA	48.....
49	M.RO'IS, SH, M.HUM NIP.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	49..... 
50	NURUL MUKMININ, S.E.,M.M NIP.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	50.....
51	NAZARUDDIN RAKHMAD SALEH, S.E., M.AP. NIP. 19760418 200312 1 004	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	51..... 
52	TEGUH ALI SABUDI, S.T., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	52..... 
53	Dra. SRI RAHAYU, M.Si. NIP. 19690404 199503 2 003	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	53..... 
54	DAVID ASADI, SE NIP.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	54..... 
55	NANIK PURWATI, S.E., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SETDA	55..... 
56	DANDOKO HADI SUSANTO, S.T., M.T. NIP.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	56..... 
57	NUR RAHMAWATI NIP.	PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN	57..... 
58	L.M SYAHRIL NIP.	DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM	58..... 
59	NIP.	PERUMDA PASAR	59.....
60	AGUNG YULIANTO NIP.	DIREKTUR UTAMA PD ANEKA USAHA LAMONGAN JAYA	60..... 
61	Vonny Canya Fekri K		61..... 

62	Reny Candra P	staf	62..... 
63	Marguwani		63..... 
64	Erwin Indahayati		64..... 
65	Linda Astutik		65..... 
66	Riski Aulia R		66..... 
67	Aprilia Kuswatin Maghfiroh		67..... 
68	Dwi Anzaini S		68..... 
69	Ali efendi		69..... 
70	Dawam R		70..... 
71	HARI PURNOMO		71..... 
72	SISWANTO		72..... 
73	M. Afandi		73..... 

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN


PUJOBROTO IRIAWAN, P. S.E., M.M., M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

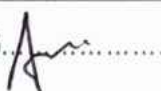
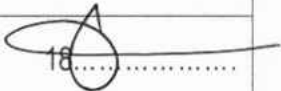


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA
PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025
HARI RABU, TANGGAL 17 JUNI 2026**

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS HENDRAWAN, SSTP.,M.AP. NIP. 19790208 199711 1 001	LAMONGAN	1.....
2	RAKHMAT HIDAYAT, S.H.MM NIP.	TURI	2.....
3	SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP NIP. 19851010 200602 1 001	DEKET	3.....
4	SUJIRMAN SHOLEH. SE.MM NIP. 19720909 200112 1 006	TIKUNG	4.....
5	ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP.19811107 200604 1 011	KEMBANGBAHU	5.....
6	ABDUL HADI, S.E.,M.M NIP.	SARIREJO	6.....
7	GATOT SUGIHARTO, S.E., M.M. NIP.	SUKODADI	7.....
8	RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M. NIP.	KARANGGENENG	8.....
9	AHMAD KURNIAWAN, S.STP.,M.Si NIP. 19850102 200312 1 001	SEKARAN	9.....
10	NURUL MISBAH, S.H.,M.M NIP.19700501 199302 1 005	PUCUK	10.....
11	TEGUH BAGIO, S.STP.,M.M NIP. 19780117 199711 1 002	MADURAN	11.....
12	NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP,M.AP NIP.19840301 200212 1 002	BABAT	12.....
13	SUTAJI, S.Kep, Ners, M.AP NIP. 19691210 199203 1 003	KEDUNGPRING	13.....
14	BAMBANG PURNOMO AP.M.M NIP. 19730922 199311 1 003	SUGIO	14.....
15	ANANG BUDI SANTOSA, S.H.,M.Si NIP.	MODO	15.....

16	ANTON SUJARWO, S.Pd.,M.M NIP.	NGIMBANG	16. 
17	M.EKO TRIPRASETYO, S.STP NIP.19871003 200602 1 001	BLULUK	17.....
18	SYAM TEGUH W, SH., MM. NIP. 19711031 199203 1 002	SAMBENG	18. 
19	ILYAS, S.Kep.,Ns NIP.	MANTUP	19.....
20	HARWAH YUTOMO, SH., MM. NIP. 19730201 199602 1 001	SUKORAME	20.....
21	ARIEF FAKHRUDIN AL HAKIM, S.STP.,M.Si NIP.	KARANGBINANGUN	21. 
22	KHOIRUL MUHSININ, S.Pd NIP.19690503 200902 1 001	KALITENGGAH	22.....
23	SUTIKNO, S.Pd, M.M NIP.19700309 199104 1 001	GLAGAH	23. 
24	TEGUH BAGIO, S.STP., M.M. NIP.	PACIRAN	24.....
25	NURUL KHUMAIDAH, S.H.,M.M NIP. 19710807 200112 2 002	BRONDONG	25.....
26	SUKUR, S.Pd.,M.Pd NIP.19680621 199304 1 001	LAREN	26.....
27	TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE NIP. 19681130 201001 1 002	SOLOKURO	27. 

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

PUJOBROTO IRIAWAN. P. S.E.,M.M.,M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA DALAM RANGKA
PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
RABU, 17 Juni 2026







